

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
(Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014)**

***THE INFLUENCE OF ECONOMY GROWTH, ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE, AND LOCAL EXPENDITURE TO INTEGRITY OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX  
(Studies on Cities and Regencies in West Java Provinsi During 2010-2014)***

**Zuraida Rakhmawati<sup>1</sup>, Mohamad Rafki Nazar<sup>2</sup>, Djusnimar Zultilisna<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>zuraidarakhmawati@student.telkomuniversity.ac.id, <sup>2</sup>Mohamadrafkinazar@telkomuniversity.ac.id, <sup>3</sup>Titi@telkomuniversity.ac.id

**Abstrak**

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014. Populasi yang digunakan adalah Provinsi Jawa Barat diperoleh 19 Kabupaten dan tujuh Kota dengan Periode 2010-2014. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews versi 8. Hasil penelitian menunjukkan, secara simultan variabel independen yang terdiri dari PE, PAD dan BD memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. sedangkan pengujian secara parsial, menunjukkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan PAD berpengaruh positif signifikan. Sedangkan variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

**Kata Kunci :** Indeks Pembangunan Manusia , Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah.

**Abstract**

*Human development is one indicator for the progress of a country. Human Development Index (HDI) is a composite index to measure human development outcomes based on a number of basic components of quality of life. This study aims to determine the effect of Economic Growth (PE), Local Revenue (PAD), Regional Expenditure (BD) on Human Development Index on the City and District in the Province of West Java period 2010-2014. population used is West Java Province obtained 19 districts and seven cities with the period 2010-2014. Data analysis method in this research is panel data regression analysis using software Eviews version 8. Based on the results of the study, simultaneously independent variables consisting of PE, PAD and BD have a significant influence on HDI. While the test partially, shows the result that Economic Growth and PAD have a significant positive effect. While the regional expenditure variable has no effect on the HDI.*

**Keywords:** Human Development Index (HDI), Economic Growth (PE), Original Local Government Revenue (PAD), Regional Expenditure (BD).

**1. Pendahuluan**

Penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 46,03 juta jiwa menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Luas wilayah provinsi Jawa Barat secara keseluruhan mencapai 35.377,76 km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayah Jawa Barat juga memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,99 persen per tahun. Meskipun selama periode 2010 hingga 2015 Jawa Barat menunjukkan kemajuan besar, status pembangunan manusia Jawa Barat masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Jawa Barat masih berstatus “sedang” dan masih sama sejak tahun 2010.

Menurut berita yang dikutip dari *Pikiran Rakyat* (02/02/17), Jawa Barat merupakan kawasan industri yang rawan terjadi ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Itu artinya aktifitas ekonomi masyarakat bawah kurang berkembang secara baik. Pembangunan di Jawa Barat kurang berdampak pada masyarakat bawah. Menurut *Deputi Bidang Statistik Sosial BPS*, Sairi Hasbullah, “proses pembangunan lebih banyak dinikmati oleh lapisan kelompok menengah.”

Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah

secara umum. Menurut Tambunan (2011:40) menyatakan “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), realisasi dari PAD dialokasikan terhadap kebutuhan pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana transportasi, tempat ibadah, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah, menurut Sukirno (2000) yang dikutip Bahrudin (2012), pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk daerah/regional. Tingginya angka belanja daerah pada suatu daerah serta pengalokasian belanja daerah yang tepat dan adil secara merata oleh pemerintah seharusnya dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut khususnya dalam pengalokasian belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang memiliki pengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat bersatu sedang dibandingkan seluruh Provinsi di Indonesia dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun hal ini tidak menjamin apakah seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Barat memiliki kualitas yang baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 dan bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 secara simultan maupun parsial. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara simultan dan parsial Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014.

## **2. Dasar Teori dan Metodologi**

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut BPS (2016), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

### **Pertumbuhan Ekonomi (PE)**

Pertumbuhan ekonomi daerah menurut Sjafrizal (2015:156) “Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil (tidak termasuk kenaikan harga), baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam periode tertentu.” Karena itu pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik. Secara normatif apabila pertumbuhan ekonomi tinggi maka pembangunan manusia akan meningkat.

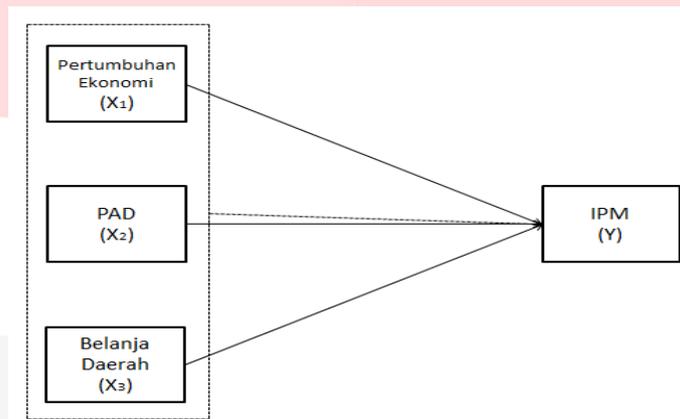
### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Kawedar (2011:2), pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana cukup untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM, seperti pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

### Belanja Daerah (BD)

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005, Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam hal ini, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dialokasikan secara adil untuk meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat. Strategi alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Pengalokasian belanja daerah yang tepat pada sektor-sektor yang berhubungan dengan pembangunan manusia di suatu daerah seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

**Gambar 2.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**



Keterangan :

- Secara Parsial  
 - - - - - → Secara Simultan

### Metodologi

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas (*non-probability sampling*), dengan metode *Purposive Sampling*. Dengan kriteria dalam pengambilan sampel: a. Memiliki data lengkap mengenai laju pertumbuhan PDRB dari tahun 2010-2014 di Badan Pusat Statistika Jawa Barat. b. penerbitan Laporan Realisasi APBD berturut-turut dari tahun 2010-2014 di Badan Pusat statistika. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 26, diantaranya 17 kabupaten dan 9 kota dengan tahun penelitian dan periode selama lima tahun dari tahun 2010-2014, sehingga jumlah data dalam penelitian ada 130 data.

### 3. Pembahasan

Berikut merupakan hasil dari pengujian statistik deskriptif:

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	IPM	PE	PAD	BD
<b>Maximum</b>	78,98	72,88	5.378,09	4.899,88
<b>Minimum</b>	58,58	9,01	384,14	104,26
<b>Mean</b>	67,54	24,34	1.877,27	1.819,71
<b>Std. Deviasi</b>	5,21	15,72	960,23	924,80
<b>Observation</b>	130	130	130	130

Sumber: Hasil Output Eviews versi 8 (data diolah)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia selama periode penelitian sebesar 67,54 %, lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 5,21%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa sampel yang digunakan untuk Indeks Pembangunan Manusia memiliki varian rendah atau cenderung tidak bervariasi dan berkelompok.

Berdasarkan hasil Uji Chow menunjukkan probability (p-value) cross section F sebesar  $0,0000 < 0,05$  dengan taraf signifikansi 5%, maka  $H_1$  diterima atau penelitian ini menggunakan *Fixed Effect*. Selanjutnya dilakukan uji Hausman dan diperoleh *p-value cross-section random* sebesar  $0,0173 < 0,05$  dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil keputusan bahwa model regresi dat panel yang digunakan adalah model *Fixed Effect*

#### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	284.134826	(25,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	554.751943	25	0.0000

Sumber: Hasil output Eviews versi 8

#### Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.158619	3	0.0173

Sumber: Hasil output Eviews versi 8

#### Uji Signifikansi Fixed Effect

Dependent Variable: IPM				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 05/02/17 Time: 12:56				
Sample: 2010 2014				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 26				
Total panel (balanced) observations: 130				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	0.095338	0.012404	7.686353	0.0000
PAD	0.001106	0.000190	5.833212	0.0000
BD	0.000010	0.000186	0.133476	0.8941
C	6.310342	19.70416	320.2542	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.998043	Mean dependent var	13977.76	
Adjusted R-squared	0.997500	S.D. dependent var	13112.26	
S.E. of regression	61.19722	Sum squared resid	378255.1	
F-statistic	1839.203	Durbin-Watson stat	1.402048	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil output Eviews versi 8

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai konstanta koefisien sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6310.342 + 0.095338 X_1 + 0.001106 X_2 + 0.000010 X_3 + \epsilon$$

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Adjusted R-Squared model penelitian menunjukkan hasil sebesar 0,997500 atau 99,75%. Dengan demikian, maka variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dapat menjelaskan atau dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014 sebesar 99,75% sedangkan sisanya yaitu 0,25% dipengaruhi oleh variabel lain.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel diatas Uji F menunjukkan hasil signifikansi sebesar  $0.000000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji metode *fixed effect model* dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel PE  
Nilai probability (T-statistic) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, hal tersebut berarti Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- b. Variabel PAD  
Nilai probability (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- c. Variabel BD  
Nilai probability (T-statistic) Belanja Daerah sebesar 0,8941. Nilai tersebut menunjukkan bahwa  $0,8941 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, hal tersebut berarti Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan nilai probability (t-statistic) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima, sehingga Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan koefisien regresi pada Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,095338 yang memiliki nilai positif menunjukkan hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut berarti Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

### Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian kedua menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probability (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,0000. Nilai tersebut berada di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, sehingga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan koefisien regresi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,001106 yang memiliki nilai positif menunjukkan hubungan positif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

### Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian ketiga menunjukkan Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probability (T-statistic) Belanja Daerah sebesar 0,8941 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar 0,000010 yang berarti bahwa  $H_{03}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, sehingga Belanja Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis regresi data panel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut.
- b. Pendapatan Asli Daerah  
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut.
- c. Belanja Daerah  
Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014. Hal tersebut diasumsikan bahwa apabila Belanja Daerah tinggi belum tentu dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut.

#### Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2016, September). Dipetik September 2016, dari <https://jabar.bps.go.id/>
- [2] Badrudin, Rudy dan Khasanah, Mufidhatul. (2011). *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. BULETIN EKONOMI, Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2011:23-30, ISSN: 1410-2293, 1-12.
- [4] Komalasari, Tia Dwitiani (2017, 02 Februari). *Ketimpangan di Jabar Tinggi*. Tersedia: <http://www.pikiranrakyat.com/ekonomi/2017/02/02/ketimpangan-di-jabar-tinggi-392361> [25 April 2017].
- [5] Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [6] Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [7] Tambunan, Tulus. T.H. (2011). *Perekonomian Indonesia : Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [8] Sjafrizal. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.